

Manajemen Infrastruktur Publik dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Muhammad Febriansyah

Universitas Sebelas Maret

Hafis Dani Tristian

Universitas Sebelas Maret

Suparmi

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Kampus V FKIP JPTK, Jl. A. Yani

No.200, Dusun II, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161

febriansyahmuhammad@student.uns.ac.id, hafizdani@student.uns.ac.id,

suparmip@staff.uns.ac.id

Abstract. *Public infrastructure management serves as a strategic instrument in strengthening inclusive national resilience toward the Indonesia Emas 2045 vision. However, challenges such as bureaucratic inefficiency, access inequality in border regions, and climate change risks present real obstacles to equitable welfare. This study aims to analyze the role of bureaucratic governance innovation and digital transformation in optimizing sustainable infrastructure development in Indonesia. The method used is a literature review, evaluating various selected scientific journal articles from the 2020-2025 period. The results indicate that the digitalization of bureaucracy through integrated systems is effective in increasing transparency and streamlining administrative barriers in public services. Nevertheless, significant constraints remain in asset management within New Autonomous Regions (DOB) and weak cross-sector coordination in border areas, which potentially disrupt national stability. Creative financing strategies through Public-Private Partnership (PPP) schemes and the integration of disaster risk mitigation through infrastructure insurance were found to be crucial solutions for maintaining the sustainability of state assets. The conclusion of this study emphasizes that inclusive national resilience can be achieved if physical development is synergized with policy innovations that prioritize environmental sustainability, social justice, and a more responsive change in bureaucratic work culture.*

Keywords: *Infrastructure Management, National Resilience, Bureaucratic Innovation, Sustainable Development, Indonesia Emas 2045.*

Abstrak. Manajemen infrastruktur publik merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional yang inklusif menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan berupa inefisiensi birokrasi, ketimpangan akses di wilayah perbatasan, dan risiko perubahan iklim menjadi hambatan nyata dalam pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi tata kelola birokrasi dan transformasi digital dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan mengevaluasi berbagai artikel jurnal ilmiah terpilih dari rentang tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi melalui sistem terpadu efektif dalam meningkatkan transparansi dan memangkas hambatan administratif pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat kendala signifikan pada manajemen aset di Daerah Otonomi Baru (DOB) dan lemahnya koordinasi lintas sektor di wilayah perbatasan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Strategi pembiayaan kreatif melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) dan integrasi mitigasi risiko bencana melalui asuransi infrastruktur ditemukan sebagai solusi krusial untuk menjaga keberlanjutan aset negara. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan nasional yang inklusif dapat dicapai apabila pembangunan fisik disinergikan dengan inovasi kebijakan yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih responsif.

Kata kunci: Manajemen Infrastruktur, Ketahanan Nasional, Inovasi Birokrasi, Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia Emas 2045.

LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar upaya mengejar ketertinggalan fisik, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan, konektivitas dan kualitas infrastruktur menjadi penentu apakah pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif atau hanya terpusat pada wilayah tertentu. Tantangan besar yang dihadapi birokrasi saat ini adalah bagaimana mentransformasikan pembangunan konvensional menjadi infrastruktur yang cerdas dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan iklim dan disrupsi digital. Kesuksesan transformasi ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi akhir dari seluruh kebijakan publik. Dalam paradigma modern, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlangsungan lingkungan dan keadilan sosial. Zul Efendi (2024) menekankan bahwa perencanaan daerah yang mengabaikan strategi adaptasi iklim global berisiko merusak hasil pembangunan yang telah dicapai. Sebagai contoh, infrastruktur publik di wilayah pesisir seperti Semarang kini menghadapi ancaman serius dari bencana alam seperti banjir rob, yang menurut Hatmoko et al. (2020) memerlukan skema manajemen risiko dan asuransi infrastruktur untuk menjamin keberlanjutannya. Pembangunan yang gagal mengintegrasikan aspek lingkungan justru akan menjadi beban biaya di masa depan, sehingga variabel kesejahteraan harus dipandang sebagai kesatuan dengan daya dukung ekologis.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi kebijakan dan efektivitas birokrasi. Birokrasi yang adaptif dan inovatif menjadi kunci dalam mengelola keterbatasan anggaran serta kompleksitas teknis di lapangan. Huda (2020) memberikan bukti bahwa digitalisasi birokrasi melalui *Government Resources Management System* (GRMS) mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien. Selain teknologi, inovasi juga mencakup skema pembiayaan alternatif seperti *Public Private Partnership* (PPP). Berdasarkan studi Haryadi et al. (2022), melalui analisis *Value for Money* yang tepat, keterlibatan sektor swasta dalam infrastruktur publik terbukti dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa memberatkan anggaran negara secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas pencapaian kesejahteraan.

Realitas pembangunan di Indonesia juga diwarnai oleh tantangan spesifik di wilayah perbatasan dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Wika (2025) mengidentifikasi bahwa hambatan koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pembangunan di wilayah perbatasan seperti Merauke. Masalah manajemen aset publik pasca-pemekaran juga sering kali memicu konflik kepemilikan yang menghambat pelayanan masyarakat (Yulanda dan Frinaldi, 2023). Minimnya data terstruktur dan rendahnya kapasitas SDM di daerah tertinggal

menjadi tantangan tambahan yang harus diselesaikan (Sholeh, 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola di wilayah strategis seperti Papua tidak hanya penting untuk ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas nasional (Gatot Suprasetya, 2024).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara menjadi simbol transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih modern dan inklusif (Puspitaningrum et al., 2023). Pembangunan IKN dirancang untuk mengintegrasikan infrastruktur fisik dengan ekosistem digital yang tangguh (Hapsari, 2024). Namun, dampak sosial seperti migrasi penduduk harus dikelola dengan hati-hati agar masyarakat lokal tidak terpinggirkan, sebagaimana diperingatkan oleh Sihotang (2024) terkait pentingnya penguatan ketahanan nasional di tingkat lokal. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan erat antara inovasi kebijakan birokrasi dengan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Meskipun konsep *Smart City* dan infrastruktur hijau mulai diadopsi, terdapat *gap* atau kesenjangan implementasi antara wilayah perkotaan dengan daerah perbatasan dan DOB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk memetakan secara komprehensif bagaimana inovasi birokrasi menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Dengan *literature review*, peneliti dapat melakukan sintesis terhadap temuan-temuan dari berbagai studi kasus yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari transformasi digital di kota besar hingga tantangan tata kelola di Daerah Otonomi Baru (DOB) dan wilayah perbatasan.

Pencarian artikel dilakukan secara sistematis pada rentang tahun 2020 hingga 2025 untuk menangkap dinamika kebijakan terbaru. Sumber data utama berasal dari berbagai artikel ilmiah dan juga portal jurnal universitas di Indonesia. Selanjutnya peneliti melakukan seleksi data dengan membaca artikel atau jurnal yang telah didapatkan dengan membaca secara utuh (*full-text assessment*), peneliti mengeksklusi artikel yang tidak memiliki metode penelitian yang jelas atau hanya bersifat opini populer. Hingga pada akhirnya, peneliti menemukan data-data dari jurnal atau artikel yang memenuhi kriteria pembahasan seperti inklusif, fokus pada lokus Indonesia, dan membahas integrasi kebijakan dengan pembangunan fisik maupun non-fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah dalam rentang waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan pemetaan yang komprehensif mengenai dinamika tata kelola publik di Indonesia. Berbagai studi yang diekstraksi menunjukkan adanya korelasi kuat antara ketangkasan birokrasi dengan keberhasilan penyediaan fasilitas publik yang berdaya tahan.

Temuan-temuan ini tidak hanya menyoroti keberhasilan teknis, tetapi juga memotret tantangan administratif yang kerap muncul di wilayah-wilayah strategis maupun daerah otonomi baru. Sebagai landasan analisis kritis pada bagian selanjutnya, berikut disajikan beberapa ringkasan temuan utama dari artikel jurnal yang telah melalui proses seleksi ketat:

No. Urut	Nama Peneliti dan Tahun Terbit Jurnal	Tema Utama/ Poin Utama	Metode	Temuan Penelitian
1.	Shoum et al. (2024)	Strategi <i>Smart City</i>	Literatur & Dokumen	Integrasi teknologi digital meningkatkan efisiensi sumber daya dan kualitas hidup menuju 2045.
2.	Muhammad Nurul Huda (2020)	Inovasi GRMS Jawa Tengah	Kualitatif Deskriptif	Digitalisasi birokrasi menciptakan transparansi dan memangkas prosedur pelayanan yang lamban.
3.	Zul Efendi (2024)	Adaptasi Perubahan Iklim	Kualitatif Pustaka	Strategi ketahanan iklim harus menjadi bagian integral dari perencanaan infrastruktur daerah.
4.	Martinus Wika (2025)	Infrastruktur Perbatasan	Kualitatif Kasus	Lemahnya koordinasi lintas instansi menjadi hambatan utama pembangunan di wilayah Merauke.
5.	Yulanda & Frinaldi (2023)	Manajemen Aset Pasca-DOB	Kualitatif	Konflik administratif aset daerah menghambat efektivitas pelayanan publik di wilayah pemekaran.

Transformasi digital bukan sekadar mengganti kertas dengan aplikasi, melainkan upaya mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan. Ini menekankan bahwa tanpa inovasi sistem, anggaran sebesar apapun akan habis oleh inefisiensi

prosedur. Sebagai contoh, implementasi *Government Resources Management System* (GRMS) di Jawa Tengah telah berhasil mengubah pola birokrasi lama yang konvensional menjadi sistem yang serba digital dan transparan (Huda, 2020). Namun, fondasi utama dari seluruh ekosistem ini adalah ketersediaan infrastruktur jaringan yang tangguh untuk menjamin konektivitas yang tidak terputus di seluruh wilayah (Hapsari, 2024).

Pemerintah daerah kini dituntut untuk lebih adaptif dalam mengelola ekonomi lokal dengan memanfaatkan data yang akurat. Penggunaan sistem informasi bisnis dalam manajemen kota terbukti menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Sunarso et al., 2025). Komunikasi pembangunan yang efektif melalui platform *e-Government* juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi program kerja (Kustiawan et al., 2023). Dalam visi yang lebih besar, integrasi konsep *smart city* diharapkan mampu menciptakan efisiensi sumber daya yang luar biasa demi menyongsong Indonesia Emas 2045 (Shoum et al., 2024). Penggunaan teknologi masa depan seperti Kecerdasan Buatan (AI) akan menjadi pilar yang mendukung evolusi kota cerdas ini secara berkelanjutan (Hariyadi et al., 2025).

Membangun daerah otonomi baru (DOB) dan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun gedung kantor. Hal ini menyoroti bahwa kehadiran negara di wilayah marginal adalah simbol kedaulatan yang harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Sebagai contoh di Merauke, efektivitas kebijakan pembangunan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan lemahnya koordinasi antarlembaga di lapangan (Wika, 2025). Sinergi lintas sektor sangat mendesak untuk dilakukan guna memastikan pembangunan di perbatasan tetap sejalan dengan agenda keamanan nasional (Tuakra, 2025). Di wilayah Papua, tata kelola pembangunan yang optimal di DOB merupakan kunci utama dalam menjaga integrasi dan keutuhan NKRI (Suprasetya, 2024).

Salah satu tantangan pasca-pemekaran wilayah adalah ketidakjelasan status kepemilikan aset yang sering memicu konflik antar-pemerintah daerah. Masalah administratif kepemilikan bangunan atau lahan, jika dibiarkan, akan secara langsung menurunkan kualitas layanan kepada publik (Yulanda & Frinaldi, 2023). Kondisi ini semakin menantang di daerah tertinggal yang minim infrastruktur pendukung dan tenaga ahli (Sholeh, 2025). Oleh karena itu, pembangunan harus bersifat inklusif dengan memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses layanan dasar (Wahid & Nurdiansyah, 2024). Di sisi lain, peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang berkeadilan (Fatharani, 2024).

Keberlanjutan pembangunan tidak boleh dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat. Analisis ini memandang bahwa pembangunan infrastruktur harus memiliki napas ekologis agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Model ekonomi hijau kini menjadi

standar baru dalam menyelaraskan antara kemajuan fisik dan perlindungan lingkungan (Karim et al., 2024). Strategi adaptasi iklim wajib dimasukkan dalam perencanaan daerah agar seluruh investasi infrastruktur tetap aman dari ancaman bencana global (Efendi, 2024). Di area perkotaan, manajemen lingkungan yang baik tercermin dari konsistensi pemerintah dalam menyediakan dan merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Djaba et al., 2025).

Keterbatasan APBD seringkali menjadi alasan klasik terhambatnya proyek strategis, sehingga inovasi pembiayaan menjadi solusi yang tak terelakkan. Skema *Public Private Partnership* (PPP) melalui analisis *Value for Money* terbukti mampu memberikan efisiensi anggaran sekaligus pembagian risiko yang lebih adil (Haryadi et al., 2022). Selain itu, untuk melindungi aset publik dari risiko kerusakan akibat faktor alam, adopsi asuransi bencana perlu mulai dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah kota (Hatmoko et al., 2020). Kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih yang layak juga harus tetap menjadi prioritas meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas (Alfin et al., 2022). Fokus pembangunan pedesaan pun kini mulai bergeser pada konsep pemberdayaan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian desa (Sutopo, 2024).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah momentum untuk mendesain ulang cara manusia Indonesia berinteraksi dengan kotanya. IKN tidak boleh hanya menjadi deretan gedung beton, melainkan harus menjadi ruang hidup yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Puspitaningrum et al., 2023). Pembangunan kota masa depan harus berani mengadopsi paradigma baru yang melihat "kota informal" sebagai bagian dari solusi tata ruang yang manusiawi (Ramadhan et al., 2024). Keberhasilan IKN juga sangat bergantung pada ketahanan sosial masyarakat lokal yang harus diberdayakan agar tidak terpinggirkan oleh arus migrasi (Sihotang, 2024).

Menghadapi era kerja baru, infrastruktur digital di pusat-pusat pertumbuhan seperti IKN harus mampu mendukung fleksibilitas kerja yang tinggi. Ketersediaan jaringan internet yang stabil akan mendorong produktivitas kerja hibrida yang kini mulai menjadi tren di kalangan profesional (Lase et al., 2025). Pada akhirnya, kota kreatif yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan kesetaraan ekonomi akan menjadi puncak dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Aulia et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis literatur sistematis mengenai manajemen infrastruktur publik dan ketahanan nasional, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam melakukan inovasi tata kelola yang adaptif.

Transformasi digital melalui sistem informasi terpadu terbukti menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Inovasi kebijakan ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi yang kaku, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya infrastruktur cerdas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era disrupsi.

Meskipun kemajuan teknologi menawarkan peluang besar, tantangan signifikan masih ditemukan pada manajemen wilayah strategis, khususnya di daerah perbatasan dan Otonomi Baru (DOB). Kendala berupa ego sektoral, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta sengketa aset pasca-pemekaran menjadi hambatan nyata yang dapat menurunkan kualitas layanan publik dan mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan fisik di wilayah marginal harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepastian hukum administrasi negara guna menjamin integritas wilayah NKRI.

Lebih lanjut, paradigma pembangunan masa depan harus mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi ketahanan nasional. Keterbatasan fiskal negara menuntut adanya kreativitas dalam pembiayaan, di mana skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dan mitigasi risiko melalui asuransi infrastruktur menjadi solusi strategis untuk menjamin keberlanjutan investasi publik. Infrastruktur yang inklusif, sebagaimana dicita-citakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan mampu menciptakan kohesi sosial yang kuat dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah diharapkan terus mendorong pemerataan infrastruktur digital hingga ke wilayah tertinggal dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan aset publik. Keberhasilan dalam mensinergikan inovasi birokrasi, pembiayaan kreatif, dan keberlanjutan ekologis akan menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing global.

DAFTAR REFERENSI

- Alfin, E., et al. (2022). Infrastruktur Air dan Tantangan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 45-56.
- Aulia, B., et al. (2025). Mewujudkan Kesetaraan Melalui Perwujudan Kota Kreatif. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 6(1), 12-24.
- Djaba, M., et al. (2025). Penerapan Manajemen Lingkungan dalam Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan. *J-MKSP: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Strategis Publik*, 3(1).

- Efendi, Z. (2024). Strategi Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Daerah untuk Menghadapi Perubahan Iklim Global. *Indonesian Journal of Research and Service Studies*, 1(4), 198-209.
- Fatharani, A. (2024). Aksesibilitas Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 5(2).
- Hapsari, A. (2024). Membangun Infrastruktur Jaringan yang Tangguh untuk Masa Depan Digital Indonesia. *Cyberarea.id: Jurnal Teknologi dan Transformasi Digital*.
- Hariyadi, et al. (2025). Mewujudkan Transformasi Digital Berkelanjutan untuk Evolusi Kota Cerdas Melalui IoT dan AI. *Infocoding: Jurnal Informatika*, 7(1).
- Haryadi, A., et al. (2022). Analisis Value for Money pada Evaluasi Kelayakan Investasi Infrastruktur Publik Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 383-395.
- Hatmoko, J. U. D., et al. (2020). Analisis Power-Interest Stakeholder terhadap Asuransi Bencana Infrastruktur Publik di Kota Semarang. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 26(2).
- Huda, M. N. (2020). Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 67-82.
- Karim, K., et al. (2024). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Manajemen Aset. *IRJE: Indonesian Research Journal*, 4(2).
- Kustiawan, W., et al. (2023). Dampak Positif & Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital terhadap Kepercayaan Publik. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial*, 5(1).
- Lase, et al. (2025). Infrastruktur Digital dan Produktivitas Kerja Hibrida Pasca-Pandemi. *Jurnal Manajemen Perubahan*, 9(1).
- Puspitaningrum, S. R., et al. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan di IKN. *Jurnal Sosial Politik ESOLUSI*, 6(2), 135-152.
- Ramadhan, et al. (2024). Penataan Kawasan Informal City dalam Kerangka SDGs 11. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 11(2).
- Sihotang, H. T. P. (2024). *Penguatan Ketahanan Nasional Masyarakat Lokal Menghadapi Dampak Migrasi IKN*. Taskap PPRA LXVI Lemhannas RI.
- Sholeh, W. (2025). Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Aset Publik di Daerah Tertinggal. *Journal Public Policy Services and Governance*, 1(2), 27-37.
- Shoum, S. A., et al. (2024). Infrastruktur Berkelanjutan dan Smart City: Strategi Birokrasi dalam Mencapai Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 12(2).
- Suprasetya, G. (2024). *Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Guna Menjaga Keutuhan NKRI*. Taskap PPRA LXVI Lemhannas RI.

- Sutopo. (2024). Perencanaan Ruang Partisipatif Menuju Desa Sejahtera Mandiri. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3).
- Sunarso, et al. (2025). Adopsi TIK pada UMKM sebagai Kunci Kesejahteraan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1).
- Tuakra. (2025). Sinergi Lintas Sektor dalam Tata Kelola Wilayah Perbatasan Merauke. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1).
- Wahid, N., & Nurdiansyah, A. (2024). *Inovasi Pemerintahan dalam Mendukung SDGs Lintas Sektor*. Pena Publisher.
- Wika, M. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah Perbatasan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 11395.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Manajemen Infrastruktur Publik Pasca Pemekaran Kabupaten Kerinci Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 1(2), 69-78.